

# STRATEGI DAN DAMPAK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERBASIS MINAPOLITAN (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)

**Akbar Khamarullah, Abdul Juli Andi Gani, Riyanto**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang  
E-mail: akhamarullah@gmail.com

**Abstrak:** *Strategy and Impact of Development Micro, Small, and Medium Enterprises Based Minapolitan (Studies in the Department of Marine and Fisheries Banyuwangi Regency).* Minapolitan intended to optimize the potential of marine and a fisheries which can be a contributor to regional economic development in order to improve the welfare of society equally, especially through micro, small, and medium enterprises (SMEs) in the field of aquaculture is still experiencing various kinds of obstacles in its development that requires attention from the local government. The results of this study indicate that the SME development strategy undertaken Department of Marine and Fisheries Banyuwangi regency, namely empowerment of human resources, venture capital assistance, and development of fish seed center. In this case the development of SMEs can improve the economic welfare of farmers and can create jobs that exist around the farming environment, regardless of the existence of enabling and inhibiting factors in the process.

**Keywords:** *Minapolitan, SMEs, development strategy*

**Abstrak:** Strategi dan Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi). Minapolitan ditujukan untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan yang dapat menjadi penyumbang pembangunan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata khususnya melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang budidaya perikanan yang saat ini masih mengalami berbagai macam hambatan dalam pengembangannya sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan UMKM yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, yaitu pemberdayaan sumber daya manusia, bantuan permodalan usaha, dan pengembangan Balai Benih Ikan. Dalam hal ini pengembangan UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi pembudidaya serta mampu menyerap tenaga kerja yang ada disekitar lingkungan usaha budidaya, terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya.

**Kata kunci:** Minapolitan, UMKM, strategi pengembangan

---

## Pendahuluan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonominya. Pembangunan sendiri ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi di Indonesia terus mengalami perubahan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan yang berjalan. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, kewenangan penyelenggaraan pembangunan ekonomi diserahkan pada pemerintah daerah melalui otonomi daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 mengisyaratkan agar pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki. Salah satu ruang atau wilayah yang banyak memiliki potensi untuk dikembangkan bagi pembangunan ekonomi daerah terdapat pada wilayah pesisir. Dalam rangka mengoptimalkan potensi pesisir tersebut pemerintah menerapkan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan menggunakan konsep Minapolitan. Menurut Nugroho dan Dahuri (2012, h.285) Minapolitan secara bebas diartikan sebagai kota perikanan. Minapolitan ditujukan guna percepatan pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan khususnya bagi daerah pedesaan yang pada umumnya lambat dalam

perkembangannya, dengan menggunakan pendekatan cepat tumbuh layaknya sebuah kota. Salah satu daerah yang menjadi *pilot project* pengembangan kawasan Minapolitan di Indonesia adalah Kabupaten Banyuwangi yang wilayah inti pengembangannya terletak di Kecamatan Muncar.

Dalam rangka mengembangkan kawasan Minapolitan yang berdasarkan pada asas demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan yang prorakyat, pengembangan kawasan Minapolitan di Kecamatan Muncar dilaksanakan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dibidang budidaya perikanan sebagai wujud nyata terselenggaranya pembangunan perekonomian masyarakat yang merata. Pemilihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sendiri, didasari pada peranan sektor ini dalam mendinamisasi perekonomian secara makro maupun mikro, dikutip dari situs <http://depkop.go.id> pada tahun 2011 jumlah UMKM yang tercatat sebanyak 55,2 juta atau 99,99% dari total jumlah jenis usaha dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 104,6 juta jiwa atau 97,24% dari total angkatan kerja yang ada. Namun, umumnya UMKM mengalami berbagai macam hambatan termasuk UMKM budidaya perikanan di kecamatan Muncar. Saat ini UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar masih didominasi oleh usaha skala mikro yang umumnya banyak mengalami berbagai macam hambatan seperti mainset pembudidaya yang belum mengelola usahanya secara profesional, rendahnya kapasitas SDM, dan Lemahnya aspek permodalan yang berdampak pada lambatnya pengembangan usaha. Oleh karenanya dibutuhkan peranan aktif dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi melalui strategi-strategi pengembangan UMKM. Menurut Marrus (dikutip dari Umar, 2003, h.31) mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut, disini strategi erat kaitannya dengan tujuan, sarana dan cara mengembangkan UMKM

Adanya strategi pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan ditujukan untuk mereduksi hambatan-hambatan yang ada sehingga nantinya UMKM mampu berkembang menjadi usaha yang kuat dan mandiri. Selain itu, berkembangnya UMKM, nantinya juga akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum serta diharapkan mampu menjadi

contoh guna menarik minat masyarakat untuk memulai usaha budidaya perikanan sehingga menumbuhkan wirausahawan-wirausahawan baru dibidang budidaya perikanan. Selain itu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah juga dapat mempercepat tercapainya tujuan kawasan Minapolitan, serta dapat menjadi sebuah langkah konservasi dengan mengurangi intensitas penangkapan ikan dilautan. Oleh sebab itu penulis mengambil judul penelitian tentang strategi dan dampak pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis Minapolitan (studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi).

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Minapolitan**

Minapolitan merupakan sebuah konsep pembangunan khususnya di bidang ekonomi yang ditujukan untuk mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan. Penggerak utama ekonomi di Kawasan Minapolitan dapat berupa sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan, atau pun kombinasi kedua hal tersebut. Menurut Nugroho dan Dahuri (2012, h.286) pada sektor perikanan tangkap yang dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan terletak pada pelabuhan perikanan dan lingkungan sekitarnya, penggerak utama perikanan budidaya adalah sentra produksi dan perdagangan perikanan di lahan-lahan budidaya produktif, selain itu sentra produksi pengolahan ikan dan perdagangan yang berada di sekitar pelabuhan perikanan, juga dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan Minapolitan.

Konsep Minapolitan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan, pelaksanaan Minapolitan didasarkan pada tiga azas yaitu 1) demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, 2) pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara terbatas, 3) penguatan daerah dengan prinsip daerah kuat-bangsa dan negara kuat. Tiga prinsip tersebut menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral pada proses pembangunannya.

## 2. Strategi

Strategi umumnya berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam peperangan, ini dikarenakan peperangan sering menggunakan *term* atau istilah strategi yang diartikan sebagai suatu cara dalam memenangkan peperangan, namun saat ini strategi tidak hanya terbatas pada kegiatan militer saja tetapi telah mencakup aspek-aspek lain yang lebih luas. Siagian (2002, h.102-103) dalam merumuskan strategi ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Strategi yang dirumuskan harus konsisten dengan situasi yang dihadapi organisasi.
- b. Strategi harus mampu memperhitungkan secara *realistic* kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan berbagai daya, sarana, prasarana dan dana yang diperlukan untuk menjalankan strategi tersebut.
- c. Strategi yang ditentukan dilaksanakan secara teliti. Tolak ukur efektif tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusannya namun mencakup juga pada pelaksanaannya.

Strategi ditetapkan oleh organisasi sebagai keberlanjutan dari perencanaan kegiatan yang dilakukan dan tentunya tidak terlepas dari rangkaian kegiatan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Siagian (2002, h.206-209) secara implisit mengungkapkan manfaat dari penetapan strategi pada organisasi antara lain:

- a. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan melalui identifikasi rincian yang lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola bidang-bidang yang ada di masa mendatang.
- b. Merupakan langkah-langkah atau cara efektif untuk implementasi kegiatan dalam rangka penetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Sebagai penuntun atau rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang.
- d. Dapat mengetahui secara kongkret dan jelas tentang berbagai cara untuk mencapai sasaran atau tujuan serta prioritas pembangunan pada bidang tertentu berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
- e. Sebagai rangkaian proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan.
- f. Mempermudah koordinasi bagi semua pihak agar mempunyai partisipasi dan persepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi, interpendensi, dan

interrelasi yang harus tetap tumbuh dan terpelihara dalam mengelola jalannya roda organisasi, sehingga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan timbulnya konflik antara berbagai pihak terkait. Dengan demikian strategi dapat berjalan sesuai dengan hal yang ditetapkan.

## 3. Pengembangan UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat karena setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya UMKM harus terus dapat dikembangkan oleh pemerintah. Adapun pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Kartasasmita (1996, h.5) harus meliputi aspek-aspek, diantaranya:

- a. Peningkatan akses kepada asset produktif, terutama modal, di samping teknologi, manajemen, dan segi lainnya.
- b. Pelatihan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. Namun, bersamaan juga perlu ditanamkan semangat jiwa wirausaha.
- c. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat pasar sangatlah penting, hal tersebut harus disertai dengan pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang diinginkan yang nantinya justru mengakibatkan kesenjangan. Untuk itu diperlukan intervensi-intervensi yang tepat dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mendasar dalam suatu ekonomi bebas, tetapi tetap menjamin terjadinya pemerataan sosial (*social equity*).
- d. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Strategi pengembangan UMKM berbasis Minapolitan:
  - a. Pemberdayaan sumber daya manusia;
  - b. Bantuan permodalan usaha;

- c. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).
2. Dampak pengembangan UMKM berbasis Minapolitan:
  - a. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi pembudidaya;
  - b. Meningkatnya sosial ekonomi masyarakat.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM berbasis Minapolitan:
  - a. Faktor penghambat;
  - b. Faktor pendukung.

Situs penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya pada Bidang Perikanan Budidaya serta Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang ada di Kecamatan Muncar yang merupakan daerah inti pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi. Situs penelitian tersebut didasarkan bahwa dari tempat-tempat tersebut akan diperoleh validitas data yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian data yang diperoleh dianalisa menggunakan metode analisis Miles dan Huberman (dikutip dari Sugiyono, 2011, h.247-253) yaitu peneliti dituntut untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Pembahasan**

Diterapkannya kebijakan otonomi daerah menjadi salah satu *trigger* atau pemicu terjadinya pembangunan besar-besaran di daerah. Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembangunan diharapkan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Didasari hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi berupaya mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki khususnya pada wilayah pesisir melalui pengembangan kawasan Minapolitan yang terletak di Kecamatan Muncar. Pada prosesnya, pengembangan kawasan Minapolitan di Kecamatan Muncar yang salah satunya dilaksanakan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya di bidang budidaya perikanan yang saat ini masih mengalami berbagai hambatan dalam pengembangannya. Adapun strategi-strategi pengembangan UMKM budidaya perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi antara lain: pemberdayaan sumber daya manusia, pemberian bantuan modal usaha, dan pengembangan Balai Benih Ikan.

### **1. Strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis Minapolitan.**

#### **a. Pemberdayaan sumber daya manusia**

Dalam rangka mengembangkan UMKM Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menerapkan beberapa strategi diantaranya adalah strategi Pemberdayaan Sumber daya manusia melalui pemberian pembinaan dan pelatihan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh DKP terhadap SDM dalam UMKM dilakukan secara kolektif melalui pembentukan kelompok usaha bersama. Dengan adanya kelembagaan dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUB), proses pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif. Setelah terbentuknya kelompok, selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan mulai memberikan pelatihan dan pembinaan. Dengan adanya Pembinaan dan pelatihan nantinya akan mempengaruhi kemampuan dan keahlian yang dimiliki pelaku usaha guna pengelolaan usaha yang dijalankan. Untuk pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sudah cukup baik, karena sudah mencakup aspek manajemen usaha dan teknik budidaya yang nantinya dapat diterapkan dalam pengembangan usaha budidaya. Hasil dari pelatihan teknik terhadap UMKM budidaya perikanan mampu meningkatkan hasil produksi dengan mengurangi jumlah produksi yang gagal panen, serta meningkatkan kualitas produksi.

#### **b. Pemberian bantuan modal usaha**

Sebagai usaha perseorangan, UMKM budidaya perikanan memiliki sumber permodalan yang terbatas. Dalam rangka penguatan sumber permodalan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan menyediakan bantuan permodalan berupa peralatan atau pun sarana penunjang produksi seperti bantuan bibit atau benih dan pakan, serta adanya program-program unggulan seperti program 10000 kolam pekarangan dan program revitalisasi tambak. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terjadi peningkatan hasil produksi setelah adanya bantuan permodalan tersebut, sebelum adanya bantuan rata-rata produksi satu unit usaha budidaya hanya mampu menghasilkan produksi antara 350-450 kg per siklusnya dan jumlah tersebut meningkat cukup signifikan setelah adanya program bantuan modal usaha khususnya program 10000 kolam pekarangan yang mana produksi yang dihasilkan dalam satu siklus meningkat antara 1000-1300 kg.

### **c. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI)**

Balai benih ikan memiliki peranan penting sebagai ujung tombak pengembangan usaha budidaya perikanan dalam hal penyediaan bibit atau benih unggul sebagai bahan baku utama usaha budidaya perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi saat ini memiliki dua Balai Benih Ikan yaitu BBI Genteng dan BBI Pakistaji. Dalam pengembangannya produksi kedua BBI tersebut terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 total produksi kedua BBI mencapai 2.798.820 ekor meningkat sebanyak 16% dari tahun 2010 yang produksinya hanya mencapai 2.326.500. Oleh karenanya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi terus melakukan pengembangan agar produksi BBI mampu memenuhi permintaan bahan baku usaha budidaya yang jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya.

## **2. Dampak pengembangan UMKM berbasis Minapolitan**

### **a. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi pembudidaya**

Adanya program pengembangan UMKM budidaya perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi seperti pembinaan dan pelatihan, pemberian bantuan paket modal usaha, serta pengembangan Balai Benih Ikan (BBI), disambut baik oleh pelaku usaha budidaya perikanan di Kecamatan Muncar. Adanya strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tentunya berdampak pada usaha budidaya perikanan yang ada di Kecamatan Muncar. Dampak yang terjadi akibat diterapkannya strategi pengembangan UMKM adalah dampak positif, salah satunya terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi pembudidaya yang salah satu indikatornya dapat dilihat dari tingkat pendapatan. Setelah adanya pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terjadi peningkatan produksi yang nantinya juga mempengaruhi peningkatan pendapatan pembudidaya. Hasil observasi pada pelaku usaha budidaya perikanan di Kecamatan Muncar ditemukan bahwa pendapatan pembudidaya mengalami peningkatan. Sebelumnya pendapatan rata-rata pembudidaya dari hasil produksi 80-100 kg hanya berkisar Rp. 250.000-450.000 meningkat menjadi Rp. 2.200.000-2.600.000 dari hasil produksi yang mencapai 1000-1300 kg dalam satu siklus panen.

### **b. Meningkatnya sosial ekonomi masyarakat**

Dampak lain yang ditimbulkan akibat adanya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis Minapolitan yaitu mampu mengangkat perekonomian masyarakat yang ada di sekitar usaha budidaya tersebut. Banyaknya pembudidaya yang berhasil dalam mengembangkan usahanya, mampu menarik minat masyarakat untuk ikut terjun dalam bidang budidaya perikanan ini. Hal ini didukung hasil temuan pada Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 mengenai jumlah unit usaha budidaya perikanan di Kecamatan Muncar yang jumlahnya terus mengalami peningkatan.

Pada 2010 jumlah unit UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar sebanyak 121 unit yang tergabung kedalam 17 kelompok usaha bersama (KUB), selanjutnya jumlah UMKM budidaya perikanan pada tahun 2011 sebanyak 131 unit usaha dalam 18 kelompok usaha bersama. Pada tahun 2012 jumlah tersebut meningkat menjadi 141 unit usaha yang tergabung dalam 19 kelompok usaha bersama, dan pada tahun 2013 jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan di Kecamatan Muncar mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 436 unit usaha yang tergabung kedalam 30 kelompok usaha bersama (KUB). Selain itu, pengembangan UMKM budidaya perikanan juga mampu menyerap tenaga kerja. Berdasarkan hasil observasi rata-rata satu unit usaha budidaya dengan kolam sebanyak lima buah, mampu mempekerjakan 2-3 orang tenaga kerja, jumlah tersebut dapat bertambah jika pelaku usaha melakukan diversifikasi usaha.

## **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis Minapolitan**

### **a. Faktor penghambat**

yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan UMKM berbasis Minapolitan antara lain yaitu:

- 1) Minimnya jumlah petugas lapang yang mengakibatkan proses pembinaan dan pelatihan tidak dapat berjalan secara optimal.
- 2) Terbatasnya akses kepada sumber permodalan khususnya dari lembaga perbankan yang mengakibatkan UMKM sulit untuk dapat mengembangkan usahanya secara mandiri.

- 3) Masih lemahnya koordinasi antar KUB yang mana sangat dibutuhkan sebagai upaya sinergi dalam mengembangkan usaha budidaya perikanan.
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana seperti masih minimnya produksi BBI yang belum mampu memenuhi kebutuhan pembudidaya yang jumlahnya terus bertambah.

#### **b. Faktor pendukung**

Adapun faktor-faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka perbaikan dari strategi pengembangan UMKM berbasis Minapolitan sebelumnya, antara lain:

- 1) Masih besarnya potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk usaha budidaya perikanan.
- 2) Adanya dukungan dari pemerintah baik dari pusat maupun pemerintah daerah berupa program-program bantuan dan pelatihan.
- 3) Adanya kemitraan dengan pihak swasta dalam hal penyediaan pakan murah yang tentunya dapat menekan biaya produksi.
- 4) Adanya peluang diversifikasi usaha melalui pengolahan hasil perikanan yang dapat meningkatkan nilai jual produk.

#### **Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis Minapolitan khususnya di bidang budidaya perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi melalui tiga starategi utama yaitu pemberdayaan sumber daya manusia, pemberian bantuan modal usaha, dan

pengembangan Balai Benih Ikan (BBI). Pemberdayaan manusia dilaksanakan secara kolektif guna efektifitas dan efesiensi proses pelatihan dan pembinaan yang akan diberikan bagi pelaku usaha budidaya perikanan yang ada di Kecamatan Muncar. Namun, pencapaian pemberdayaan ini masih belum optimal karena terhambat dengan minimnya jumlah tenaga lapang yang ada dalam memberikan pelatihan yang mengakibatkan minimnya intensitas pelatihan yang diberikan.

Pemberian bantuan modal usaha sudah cukup baik bagi pengembangan UMKM, namun dalam pengembangan usaha jangka panjang tetap membutuhkan modal produktif yang saat ini masih sulit diakses oleh pelaku usaha budidaya khususnya pada lembaga perbankan. Dengan tersedianya akses pada sumber pemodaln produktif UMKM dapat berkembang secara mandiri tanpa harus terus bergantung pada pemerintah.

Pengembangan Balai Benih Ikan masih harus terus dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan UMKM budidaya perikanan yang jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya. Adapun yang menjadi dampak dari diterapkannya strategi pengembangan UMKM berbasis Minapolitan diantaranya adalah meningkatnya perekonomian pembudidaya akibat meningkatnya hasil produksi yang nantinya juga mempengaruhi meningkatnya pendapatan pembudidaya. Selain itu, dampak lainnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar lingkungan usaha budidaya. Keberhasilan usaha budidaya yang ada mampu menarik minat masyarakat untuk mulai beralih profesi dengan harapan memperbaiki perekonomiannya dan usaha budidaya juga mampu menyerap tenaga kerja yang ada.

---

#### **Daftar Pustaka**

- Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.** Dinas Kelautan dan Perikanan. (2013). Banyuwangi.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). **Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembelajaran Yang Berakar Pada Masyarakat.** Jakarta, BAPPENAS.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.18/MEN/2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan.** Jakarta, Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2011) **Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Tahun 2010-2011.** [internet], Available from: <<http://www.depkop.go.id>> [Accessed 20 Januari 2014].
- Siagian, Sondang P. (2002). **Manajemen Strategik.** Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2011). **Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D.** Bandung, Alfabeta.
- Umar, Husein. (2003). **Strategik Management In Action.** Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.7).** Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.